

Penerapan Accounting Dalam Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Di Indonesia

Abidzar Al Ghifari¹, Mutammam²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

e-mail: abidzar.al.ghifari24078@mhs.uingusdur.ac.id¹, mutammam@uingusdur.ac.id²

Abstrak

Tata kelola keuangan yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan *Good University Governance* (GUG) pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi, pengelolaan anggaran, mekanisme akuntabilitas, serta transparansi keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya PTN-BLU dan PTN-BH, serta Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dikelola oleh yayasan. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengkaji berbagai penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021–2026. Proses kajian dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTN menerapkan tata kelola keuangan yang lebih terstandarisasi dan terikat pada regulasi pemerintah, termasuk penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, PTS memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan, namun sangat bergantung pada pendapatan yang berasal dari mahasiswa dan sumber dana masyarakat lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PTN masih menghadapi tantangan berupa

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan, Good University Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Perguruan Tinggi.

Abstract

Effective financial governance is a fundamental pillar in achieving Good University Governance (GUG) in both public and private higher education institutions in Indonesia. This study aimed to analyze the implementation of accounting systems, budget management practices, accountability mechanisms, and financial transparency in public universities, particularly Public Service Agency Universities (PTN-BLU) and Legal Entity State Universities (PTN-BH), as well as private universities managed by foundations. The research employed a systematic literature review approach by examining relevant studies published between 2021 and 2026. The review process focused on identifying key patterns, challenges, and best practices in university financial management.

The findings indicate that public universities operate under strict and standardized government regulations, including the application of national accounting standards and public sector accounting frameworks. In contrast, private universities enjoy greater managerial flexibility but remain highly dependent on tuition fees and other community-based funding sources. The study also reveals that public universities continue to face challenges related to bureaucratic procedures and the optimization of income-generating activities, whereas private universities concentrate on maintaining financial sustainability and strengthening governance relationships between foundations and university management. Furthermore, the adoption of digital accounting systems and budget realization information systems emerges as an important strategy for enhancing transparency, reducing the risk of fraud, and improving institutional performance. In conclusion, effective financial governance remains a critical factor in supporting accountability, transparency, and sustainability within higher education institutions. Digital transformation in financial management plays a significant role in strengthening governance practices and advancing the quality of higher education in Indonesia

Keywords : *Financial Governance, Good University Governance, Accountability, Transparency, Higher Education.*

LATAR BELAKANG

Sektor pendidikan tinggi di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi masif yang menuntut profesionalisme di segala lini, tidak terkecuali dalam aspek manajemen keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi diberikan otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, otonomi ini membawa konsekuensi logis berupa tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi (Priharta et al., 2021). Kepercayaan masyarakat dan pemerintah sangat tergantung pada bagaimana institusi pendidikan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola.

Di Indonesia, dikotomi kelembagaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menciptakan lanskap tata kelola keuangan yang berbeda. PTN terbagi lagi menjadi PTN Satuan Kerja (Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memiliki derajat fleksibilitas finansial berbeda-beda di bawah pengawasan regulasi negara yang ketat (Setyorini et al., 2022). Di sisi lain, PTS beroperasi di bawah naungan badan penyelenggara berbentuk yayasan, di mana dinamika keuangannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan menarik minat mahasiswa baru sebagai sumber pendapatan utama (Reschiwati et al., 2021).

Penerapan disiplin akuntansi (*accounting*) bukan lagi sekadar instrumen pencatatan transaksi (*bookkeeping*), melainkan telah bertransformasi menjadi alat strategis dalam pengambilan keputusan, pengendalian internal, dan perwujudan *Good University Governance* (GUG) (Ashari, 2024). Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan dengan prinsip akuntansi yang sehat berisiko fatal; bagi PTS hal ini dapat menyebabkan penutupan institusi karena krisis likuiditas, sementara bagi PTN dapat memicu temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan anggaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif melalui *Systematic Literature Review* (SLR). Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi yang dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2026) dan dapat diakses melalui pangkalan data Google Scholar dan SINTA. Tahapan analisis meliputi pengumpulan artikel dengan kata kunci “tata kelola keuangan perguruan tinggi”, “akuntansi PTN BH”, “ISAK 35 perguruan tinggi swasta”, reduksi data, penyajian data secara komparatif, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Karakteristik dan Struktur Akuntansi: PTN vs PTS

Struktur keuangan antara PTN dan PTS memiliki distingsi yang sangat kontras. Hal ini secara fundamental memengaruhi bagaimana sistem akuntansi dirancang, dijalankan, dan dilaporkan di masing-masing bentuk institusi.

Aspek Perbandingan	Perguruan Tinggi Negeri (PTN-BLU / BH)	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Sumber Pendanaan Utama	Mitra Industri, <i>Income Generating Unit</i>	Dana Masyarakat (SPP/Uang Gedung), Hibah Yayasan
Standar Akuntansi	SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) & SAK (Kombinasi)	SAK – ISAK 35 (Entitas Orientasi Nonlaba)
Sistem Informasi	Terintegrasi Negara (misal: SAKTI, SIRADI)	Mandiri / Sistem Informasi Internal (SIRA)
Auditor Utama	BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) & KAP	KAP (Kantor Akuntan Publik) Independen

Aspek Perbandingan | Perguruan Tinggi Negeri (PTN-BLU / BH) | Perguruan Tinggi
Pada PTN, otonomi pengelolaan keuangan menuntut implementasi sistem akuntansi yang mampu memisahkan dana modal dari negara (APBN) dan pendapatan operasional yang diperoleh dari masyarakat melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Priharta et al., 2021) menjelaskan bahwa penggunaan Sistem Informasi Realisasi Anggaran pada PTN sangat krusial untuk memastikan bahwa serapan anggaran bergerak selaras dengan rencana kerja tahunan (RKA) tanpa melanggar pagu yang ditetapkan kementerian.

Sebaliknya, pada PTS, tantangan terbesar sistem akuntansi adalah mengelola volatilitas arus kas masuk (*cash inflow*) yang sangat bergantung pada siklus penerimaan mahasiswa baru. Sering kali terjadi *trade-off* di PTS antara menurunkan biaya pendidikan demi menjaring kuantitas mahasiswa dengan kebutuhan pendanaan untuk meningkatkan mutu infrastruktur dan SDM (Fitriani & Muljono, 2019). Akuntansi biaya di PTS dituntut lebih presisi dalam menghitung *unit cost* per mahasiswa agar yayasan tidak mengalami defisit operasional.

B. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi pada kedua institusi memiliki payung hukum dan kiblat yang berbeda, yang berdampak pada bentuk penyajian laporan keuangan akhir tahun.

1) Implementasi Standar pada PTN (SAP dan SAK)

Bagi PTN, khususnya yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum (PTN-BH), sistem akuntansi yang diterapkan merupakan hibridisasi antara Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun dalam hal konsolidasi nasional, mereka wajib melakukan rekonsiliasi agar selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Setyorini et al., 2022)

Proses ini memerlukan akurasi yang tinggi karena melibatkan akun-akun khusus seperti hak atas kekayaan intelektual, pengelolaan aset negara yang dipisahkan, serta pendapatan investasi dari *endowment fund* (dana abadi). Surachman et al. (2023) menyebutkan bahwa kerumitan utama pada PTN adalah melakukan pencatatan aset tetap tunggal yang bersumber dari hibah, APBN murni, dan PNBPN, di mana mekanisme penyusutannya harus dihitung dengan formula yang berbeda agar tidak terjadi *double-counting* saat diaudit oleh BPK.

2) Implementasi ISAK 35 pada PTS

Bagi PTS, sejak berlakunya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Orientasi Nonlaba (menggantikan PSAK 45), terjadi pergeseran paradigma pencatatan keuangan. ISAK 35 menegaskan bahwa fokus utama laporan keuangan organisasi nonlaba bukan pada kepemilikan keuntungan (laba), melainkan pada penyajian informasi mengenai pembatasan sumber daya yang diterima (TULUNG et al., 2022).

Laporan keuangan PTS berdasarkan ISAK 35 wajib menyajikan lima komponen utama:

1. Laporan Posisi Keuangan (menggantikan Neraca)
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Perubahan Aset Netto
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Kendala di lapangan menunjukkan bahwa banyak PTS skala kecil dan menengah belum sepenuhnya mampu menerapkan ISAK 35 karena keterbatasan kompetensi SDM di bagian keuangan. Akibatnya, pemisahan antara aset neto terikat (misalnya dana hibah penelitian kementerian) dan aset neto tidak terikat (dana SPP harian) sering kali tercampur. Hal ini memicu ketidakakuratan informasi finansial yang disajikan kepada pihak eksternal, termasuk asesor akreditasi (Widiyanti, 2022).

C. Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal dalam Tata Kelola

Konsep akuntabilitas dalam disiplin akuntansi perguruan tinggi tidak hanya sekadar mencocokkan angka debit dan kredit, melainkan pemenuhan kewajiban moral dan hukum kepada *stakeholders*.

1.) Dinamika Akuntabilitas PTN

PTN menghadapi tuntutan akuntabilitas vertikal yang berlapis-lapis.

Sebagai instansi yang menggunakan keuangan negara, rektorat PTN harus mempertanggungjawabkan setiap sen pengeluaran kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Keuangan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) (Santi et al., 2022).

Secara horizontal, PTN bertanggung jawab kepada mahasiswa dan masyarakat umum untuk menyediakan fasilitas pendidikan bermutu dengan biaya yang rasional (UKT). (Kamila & Munajat, 2025).menemukan bahwa status PTN-BH memberikan kelonggaran dalam pemanfaatan dana, namun justru memperketat audit internal. Setiap transaksi wajib lolos dari verifikasi Satuan Pengawas Internal (SPI) sebelum diajukan ke audit eksternal BPK untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.) Hubungan Keagenan Rektorat-Yayasan pada PTS

Pada PTS, akuntabilitas keuangan diuji oleh dinamika hubungan keagenan (*agency relationship*) antara Rektorat (sebagai agen/pengelola) dan Yayasan (sebagai prinsipal/pemilik aset). Masalah klasik yang sering diangkat dalam penelitian tata kelola PTS adalah terjadinya intervensi berlebihan dari pihak yayasan terhadap dompet operasional akademik (Reschiwati et al., 2021).

Sering kali, pendapatan yang bersumber dari mahasiswa ditarik terlebih dahulu ke rekening yayasan sebelum didistribusikan ke universitas, sehingga mengganggu likuiditas operasional kampus. Menurut (David et al., 2022), penerapan akuntansi yang transparan dapat bertindak sebagai penengah. Dengan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen secara berkala, rektorat dapat membuktikan efisiensi biaya operasional, sementara yayasan mendapatkan kepastian bahwa aset modal mereka dikelola dengan risiko seminimal mungkin tanpa mengorbankan mutu akademik.

D. Transparansi Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Citra Institusi

Transparansi keuangan adalah indikator utama keberhasilan implementasi *Good University Governance* (GUG). Di era digital, keterbukaan informasi ini diwujudkan melalui publikasi ringkasan laporan keuangan dan realisasi anggaran pada laman resmi perguruan tinggi.

(Natawibawa et al., 2019) mengungkapkan bahwa universitas (baik negeri maupun swasta) yang secara terbuka mempublikasikan laporan realisasi anggarannya mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan publik. Bagi PTS, transparansi ini berdampak langsung pada peningkatan animo calon mahasiswa baru dan kemudahan mendapatkan dana hibah atau kerja sama dari sektor industri (Suhendri & Iriani, 1969). Bagi PTN, transparansi ini meredam gejolak atau protes mahasiswa terkait penentuan golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT), karena mahasiswa dapat melihat ke mana saja alokasi dana operasional dialirkan.

E. Digitalisasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Mitigasi Risiko Fraud

Akselerasi adopsi teknologi pasca-pandemi memaksa perguruan tinggi beralih dari pencatatan manual (*spreadsheet* sederhana) menuju Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terintegrasi.

1.) Manfaat Integrasi Sistem

PTN saat ini diwajibkan menggunakan aplikasi terintegrasi seperti SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang memantau siklus anggaran mulai dari perencanaan (*e-budgeting*), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban (*e-reporting*). Di sisi PTS, pengembangan Sistem Informasi Rencana Anggaran (SIRA) mandiri berbasis *cloud* mulai marak digunakan untuk menghubungkan bagian registrasi mahasiswa, bagian akademik, dan bagian keuangan pusat (Dewi et al., 2025). Integrasi ini meminimalkan kesalahan input data (*human error*) dan mempercepat penyusunan laporan konsolidasi bulanan.

2.) Pencegahan Tindakan *Fraud* (Kecurangan Finansial)

Celah terjadinya *fraud* dalam dunia pendidikan tinggi umumnya berkisar pada manipulasi pengadaan barang dan jasa (fiktif atau *mark-up* harga), serta penggelapan dana sisa kegiatan Tri Dharma. (Vadillah et al., 2025) menegaskan bahwa implementasi sistem *cashless* (pembayaran nontunai) yang terhubung langsung dengan perbankan melalui sistem *Virtual Account* bagi mahasiswa berhasil menekan angka kebocoran dana hingga mendekati 0%.

Setiap pengeluaran anggaran untuk penelitian atau operasional fakultas harus disertai bukti digital terverifikasi dalam sistem akuntansi. Jika terjadi kejanggalan atau ketidaksesuaian pagu anggaran, sistem secara otomatis akan menolak transaksi tersebut (*lock system*), yang secara tidak langsung memperkuat baris pertahanan pengendalian internal (*internal control*) institusi (Pujilestari et al., 2025).

SIMPULAN

Penerapan akuntansi memegang peranan krusial sebagai fondasi tata kelola keuangan yang sehat di perguruan tinggi Indonesia demi mewujudkan *Good University Governance* (GUG). PTN dicirikan oleh kepatuhan regulasi publik yang ketat, *standarisasi* berlapis (SAP dan SAK), dan tuntutan optimalisasi aset negara. Di lain pihak, PTS dituntut memiliki fleksibilitas dan ketajaman akuntansi manajerial berbasis ISAK 35 untuk menjaga keberlanjutan finansial (*financial sustainability*) di tengah ketatnya kompetisi perebutan mahasiswa baru. Keduanya memiliki urgensi yang sama dalam hal penerapan digitalisasi sistem informasi akuntansi guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta memitigasi risiko salah urus keuangan (*financial mismanagement*) dan tindakan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, C. A. (2024). Educational Transformation Through Good University Governance: HR Empowerment Strategies In Private Universities. *UTSAHA: Journal Of Entrepreneurship*, 86–95.
- David, J., Tewal, B., Sendow, G. M., Trang, I., & Lumintang, G. G. (2022). Good University Governance, Reputation Risk, And Public Accountability Private Universities (Pts). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 142–156.
- Dewi, G. A. K. R. S., Suartana, I. W., Mimba, N. P. S. H., & Suaryana, I. G. N. A. (2025). *Good University Governance Berbasis Tri Hita Karana: Integrasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi Di Bali*.

- Fitriani, S., & Muljono, H. (2019). Beyond Good Governance: An Ultimate Key Success For Higher Education Quality. *Journal Of Education, Teaching And Learning*, 4(1), 210–216.
- Kamila, N. R., & Munajat, D. E. (2025). *The Role Of Internal Audit In The Implementation Of Good University Governance To Improve Financial Management Accountability (Case Study At PTN-BH , Universitas Pendidikan Indonesia)*. 5(7), 9577–9583.
- Natawibawa, I. W. Y., Mulya, I. M. O., & Yoh, W. H. (2019). TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY AS DETERMINANTS IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF UNIVERSITIES : A STUDY ON STATE UNIVERSITIES IN MALANG CITY. *JURNAL TATA KELOLA & AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA*, 5(1), 57–72.
- Priharta, A., Gani, N. A., Ananto, T., & Utama, R. E. (2021). *Tata Kelola Keuangan Untuk Perguruan Tinggi Dengan Sistem Informasi Realisasi Anggaran*. Global Aksara Pres.
- Pujilestari, K., Rely, G., & Sari, P. N. (2025). Accountability And Transparency In Higher Education Management. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 3(3), 947–960.
- Reschiwati, R., Wiwik Pratiwi, W. P., Ida Musdafia Ibrahim, I. M. I., & Adji Suratman, P. A. (2021). Implementation Of Good University Governance In Private Higher Education Institutions In Indonesia. *Journal Of Southwest Jiaotong University*, 56(3).
- Santi, S. F., Herwanto, R., Novita, S., & Andi, D. (2022). DESIGNING A HOLISTIC AND STRATEGIC MODEL FOR INDONESIA PRIVATE HIGHER EDUCATION. *International Conference On Government Education Management And Tourism*, 1(1).
- Setyorini, D., Mustikawati, R. I., & Waluyo, I. (2022). Kesiapan Pengelolaan Aset UNY Dalam Rangka Optimalisasi Income Generating Untuk Mendukung PTNBH UNY. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 20(2), 198–208.
- Suhendri, H., & Iriani, N. I. (1969). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja Gpdi Gloria Malang. *Jurnal Cakrawala*.
- TULUNG, G. R., Muaja, O. M. T., & Kakauhe, A. C. I. (2022). *PENERAPAN ISAK 35 PADA ORGANISASI NONLABA (STUDI KASUS PADA YAYASAN BUMI TANGGUH). UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO*.
- Vadillah, N., Rusli, A., & Pratiwi, I. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.55606/Jaemb.V5i3.8076>
- Widiyanti, A. (2022). TERHADAP KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA. *Jurnal TECHNOBIZ*, 5(2), 124–133.